

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Pekalongan

Halaman 3

## SKTM Sedot Puluhan Miliar

**PEKALONGAN** - Biaya kesehatan warga miskin di Kota Batik membludak. Penyebabnya, data jumlah warga miskin yang tak valid. Sehingga pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pembiayaan kesehatan tak terkendali. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin hanya 7,5 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 23.000 jiwa. Namun, ternyata pemohon SKTM untuk pembiayaan kesehatan mencapai 150.000.

Asumsinya, Pemkot harus menambah anggaran pembiayaan kesehatan bagi sekitar 120.000 warga pemohon SKTM. Jika dikalkulasi menggunakan pembiayaan iuran JKN-KIS kepada 120.000 warga untuk kelas III yakni Rp 25 ribu per jiwa, berarti APBD Kota Pekalongan harus nombok sekitar Rp 36

**Tahun ini totalnya Rp 16 M. Pada penetapan sudah diberi Rp 11 M dan ada pengajuan tambahan pada perubahan untuk pembiayaan 10 ribu warga miskin Rp 4,6 M. Padahal tahun ini terakhir, semua harus masuk JKN-KIS**

**SUDJAKA MARTANA**  
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan

Miliar. " Jika kita masukkan semua ke

JKN-KIS kelas III, maka 120.000 dikali Rp 25 ribu, mencapai Rp 36 Miliar," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Martana usai public hearing Raperda Satu Data Terpadu.

Praktiknya, pembiayaan kesehatan tidak semuanya menggunakan JKN-KIS. Sehingga harus ada pembiayaan langsung sesuai kebutuhan warga yang mengajukan SKTM. Tahun 2017, dari anggaran kesehatan sebesar Rp 17,7 Miliar, sebanyak 50 persen atau Rp 8,85 M dipakai membayar premi JKN-KIS bagi 30 ribu warga. Sedangkan 50 persen sisanya, digunakan untuk biaya perawatan kesehatan hanya untuk 2000 hingga 3000 orang. Apalagi, di luar pembiayaan JKN-KIS dengan dana APBD Kota Pekalongan, ada bantuan pembiayaan JKN-KIS dari pemerintah

pusat bagi 78 ribu warga miskin dan 20 ribu jiwa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Komisi C berharap data warga miskin bisa ditertibkan.

"Tahun ini totalnya Rp 16 M. Pada penetapan sudah diberi Rp 11 M dan ada pengajuan tambahan pada perubahan untuk pembiayaan 10 ribu warga miskin Rp 4,6 M. Padahal tahun ini terakhir, semua harus masuk JKN-KIS," tambah Sudjaka. DPRD Kota Pekalongan juga mengajukan Raperda Prakarsa terkait Satu Data Terpadu. Tujuannya, dengan data terpadu maka perencanaan, penganggaran dan implementasi program dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Ada acuan Bappenas bahwa data yang disusun harus akurat, relevan, tepat waktu, koheren dan mudah diakses masyarakat. (nul/dik).